

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Luciana Spica dan Ikka Retrianasari (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas (*net profit margin-NPM*), ukuran (*size*) perusahaan, dan status perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2001-2004 dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak dua ratus perusahaan selama tahun 2001-2004.

Persamaan dari penelitian ini adalah variabel dependen yang digunakan adalah kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan, sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan status perusahaan sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Pada penelitian terdahulu periode penelitiannya adalah 2001-2004 sedangkan pada penelitian ini periode penelitiannya 2008-2009.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan dan status perusahaan. Kelengkapan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh semua variabel-variabel bebas tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (wajib dan sukarela) adalah variabel likuiditas, ukuran perusahaan dan status perusahaan yang berpengaruh signifikan $< 10\%$.

2. Md. Abdur Rouf dan Md. Abdullah-Al Harun (2011)

Penelitian tentang "*Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh*". Studi ini meneliti hubungan antara struktur kepemilikan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 2007. Terdapat 94 sampel perusahaan di Bangladesh. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk hipotesis yang pertama bahwa tingkat pengungkapan perusahaan adalah negative. Untuk hipotesis kedua dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan perusahaan secara positif terkait dengan persentase tinggi saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional, maka semakin tinggi pengungkapan sukarela.

Persamaan dari penelitian ini adalah variabel dependen menggunakan pengungkapan sukarela. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tahun yang digunakan adalah tahun 2007, dan variabel yang digunakan adalah total asset, total penjualan, laba bersih, dan modal.

3. Desmon C. Y. Yuen, Ming Liu, Xu Zhang, dan Chan Lu (2009)

Penelitian tentang “*A Case Study Of Voluntary Disclosure by Chinese Enterprises*” mengkaji dampak fitur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan perusahaan-spesifik karakteristik pada pengungkapan sukarela yang diberikan oleh publik yang terdaftar di Bursa Saham Shanghai di Cina. Fitur struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance meliputi (1) konsentrasi kepemilikan; (2) kepemilikan oleh negara dan instansi terkait; (3) kepemilikan individu; (4) petugas Chief Executive adalah ketua dewan direksi; (5) dewan independen; (6) komite audit.

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan pengungkapan sukarela. Dengan menggunakan indeks pengungkapan relative untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela, hasil kami menunjukkan bahwa kepemilikan individu, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan leverage secara signifikan berkaitan dengan tingkat pengungkapan sukarela.

4. Linda A. O. Tanor (2009)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya pengungkapan laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi. Manajemen sebagai pihak yang melaksanakan operasional perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, namun disisi lain pihak manajemen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Perbedaan kepentingan antara pihak yang mengendalikan perusahaan (manajemen sebagai agen) dengan pihak pemegang saham (*principal*) akan menyebabkan konflik kepentingan (*agent conflict*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jensen

dan Meckling (1976) bahwa konflik keagenan muncul akibat adanya kepentingan yang berbeda antara manajer sebagai agen dengan pemilik modal sebagai principal. Masalah yang timbul dari hubungan keagenan ini sebenarnya bermula dari adanya hasrat pihak agen untuk tidak bertindak demi kepentingan terbaik principal. Mengingat pentingnya informasi dan adanya asimetri informasi yang mempengaruhinya, diperlukan upaya untuk mengatasi asimetri tersebut. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang pentingnya penggunaan pengungkapan (*disclosure*) atas laporan keuangan untuk meminimalisasi adanya asimetri informasi.

Sejumlah penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa disclosure mempunyai hubungan yang signifikan dengan asimetri informasi. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam penelitiannya, Healy dan Palepu menemukan bahwa proses pelaporan keuangan yang seharusnya merupakan mekanisme yang berguna bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor ternyata tidak efektif. Ketidakefektifan proses tersebut diantaranya disebabkan oleh keunggulan informasi yang dimiliki oleh manajer (hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi). Berkaitan dengan hal tersebut, manajer dapat meningkatkan komunikasinya dengan investor dengan mengembangkan strategi *disclosure*, terlebih *voluntary disclosure*.

Table 2.1

Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Uraian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1. | Luciana Spica dan Ikka Retrianasari (2007) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan adalah kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan. 2. Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan status perusahaan sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit. 2. Pada penelitian terdahulu periode penelitiannya adalah 2007 sedangkan pada penelitian ini periode penelitiannya 2008-2009. |
| 2. | Md. Abdur Rouf dan Md. Abdullah-Al Harun (2011) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen menggunakan pengungkapan sukarela. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel yang digunakan adalah total asset, total penjualan, laba bersih, dan modal 2. Pada penelitian terdahulu periode penelitiannya adalah tahun 2002 sedangkan pada penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2008-2009. |
| 3. | Desmon C. Y. Yuen, Ming Liu, Xu Zhang, dan Chan Lu (2009) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. variabel independen pada penelitian terdahulu adalah pengungkapan sukarela dan pada penelitian saat ini adalah pengungkapan wajib. |

2.2 Landasan teori

2.2.1 Teori Agensi

Suartana (2010) menyatakan bahwa teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Manajemen diberikan wewenang dalam kebijakan pengambilan keputusan sehingga manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk menyejahterakan pemilik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak (prinsipal dan agen) hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya maka manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang sebaliknya manajemen cenderung memaksimalkan profit jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka panjang. Prinsipal memaksa pihak manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai standar agar dapat memonitor dan mengendalikan tindakan pihak manajemen. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan tingkat kemakmuran sebagai kepentingannya masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan perusahaan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan konflik.

Penyatuan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang disebut dengan konflik agensi (Suartana, 2010).

Suartana, (2010) menyatakan bahwa konflik agensi muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara *shareholders* dan manajemen, yang kemudian memungkinkan manajemen untuk mengambil kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan selain itu tidak adanya keterbukaan manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya pada pemilik perusahaan sehingga terdapat tata kelola perusahaan yang kurang baik. *Shareholders* sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola kekayaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui pembagian dividen. Sedangkan pihak manajemen yang diberi tanggung jawab mengelola kekayaan perusahaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui kompensasi. Kondisi ini menyebabkan pihak manajemen cenderung tidak memberikan informasi yang berpengaruh negatif terhadap kepentingan tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang terbuka dan *accountable* sehingga pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan tersebut, serta menilai keefektifan keputusan yang telah diambil oleh manajemen. Suartana, (2010) menyatakan bahwa ketika perusahaan yang kepemilikannya tunggal dikelola oleh pemilik, maka pemilik akan membuat keputusan-keputusan

yang memaksimalkan kepentingannya. Akan tetapi, apabila pemilik yang sekaligus merangkap sebagai manajer ini menjual sebagian sahamnya kepada pihak luar, biaya agensi akan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham.

Biaya agensi yang timbul diantaranya adalah biaya monitoring yang dilakukan oleh pihak prinsipal. Biaya monitoring ini mencakup biaya untuk proses auditing, penganggaran, kontrol, dan sistem kompensasi agen. Karena adanya biaya agensi yang timbul, maka pihak manajemen harus dapat mengurangi biaya agensi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat tiga macam biaya keagenan yaitu:

- a. *Biaya Monitoring*: biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi aktivitas dan perilaku manajer antara lain membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan premi asuransi untuk melindungi aset perusahaan.
- b. *Biaya Bonding*: biaya yang ditanggung oleh manajer untuk memberi jaminan kepada pemilik bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
- c. *Residual Loss*: biaya yang ditanggung prinsipal untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaan. Pihak manajemen diwajibkan memberikan laporan periodik kepada pihak prinsipal tentang kondisi perusahaan yang dijalankannya. Sementara pihak prinsipal akan menilai kinerja manajemennya

melalui laporan keuangan yang disampaikan, sehingga laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Rahmawati, 2009). Penilaian kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan kinerja keuangannya, tetapi juga berdasar kinerja nonkeuangan perusahaan. Oleh karena itu, ada persyaratan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi nonkeuangan. Hal ini diharapkan bahwa dengan mengungkapkan informasi tambahan (yang tidak diwajibkan) agen dan prinsipal dapat mengurangi biaya agensi (Healy dan Palepu, 1993).

2.2.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi : (SAK, 2007:9).

1. Investor.

Penanaman modal berisiko dan penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh temponya.

4. Pemasok dan kreditur lainnya.

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan merreka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah.

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat.

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.2.3 Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu penyajian informasi dalam laporan keuangan yang menyebutkan setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan pembaca yang menerima informasi. Informasi ini memberikan suatu penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Segala sesuatu yang bersifat material akan diungkapkan dalam laporan, termasuk informasi kuantitatif (secara tuntutan) yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun negatif, mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi, serta

yang ditetapkan oleh otorisasi atau badan pengawas pasar modal serta bursa saham. Informasi laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan yang termasuk dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI.

Manajemen sebagai pengelola kekayaan perusahaan berperan sebagai agen, sementara investor sebagai pemilik berperan sebagai *principal*. Laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemilik (Ainun dan Fuad, 2000). Laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor luar (Healy dan Palepu 1993 dalam Ainun dan Fuad 2000). Rasional yang mendasari perlunya praktek pengungkapan L/K oleh manajemen kepada *stakeholder* dijelaskan dalam hubungan principal dan agen (Ainun dan Fuad, 2000).

2.2.4 Luas Pengungkapan Sukarela

Laporan tahunan merupakan media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi perusahaan baik yang berupa kondisi keuangan maupun informasi lainnya kepada pemegang saham, *stakeholder*, kreditor. Kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan. Pengungkapan sukarela tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan. Dengan kata lain

Imhoff mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan (Imhoff 1992 dalam Ainun dan Fuad 2000).

Menurut Sabeni (2002) suatu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan, perusahaan akan memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Bila manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan maka perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan sukarela perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Biaya pengungkapan sukarela merupakan seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela. Biaya pengungkapan sukarela dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan langsung dalam pengembangan dan penyajian informasi. Termasuk biaya langsung diantaranya biaya pengumpulan informasi, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan, dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya tidak langsung ialah biaya yang timbul akibat diungkapkan atau tidak diungkapkan informasi. Contohnya yaitu biaya litigasi dan biaya *propriety*/biaya *competitive disadvantage*. Biaya litigasi adalah biaya yang timbul karena pengungkapan informasi yang menyesatkan, sedangkan biaya *propriety* ialah biaya yang timbul akibat diterbitkannya laporan keuangan yang justru akan digunakan pesaing melakukan *positioning*, sehingga dapat melemahkan posisi perusahaan yang melakukan pengungkapan.

Menurut Hendriksen, 2002 dalam Linda A. O. Tanor, 2009 pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Dahlan (2003) dalam Linda A. O. Tanor (2009) *disclosure* dibedakan atas dua jenis, yaitu:

1. *Mandatory disclosure* : merupakan *disclosure* yang wajib dikemukakan oleh perusahaan publik kepada masyarakat. Terdapat badan khusus yang meregulasi kewajiban *disclosure* ini, misalnya IAI dan BAPEPAM.
2. *Voluntary disclosure* : merupakan *disclosure* yang diberikan oleh perusahaan diluar item-item yang diwajibkan untuk di-*disclose*. *Voluntary disclosure* ini disesuaikan sesuai dengan kebijakan perusahaan guna memberikan informasi yang lebih relevan serta meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham.

Menurut subekti (2001) dalam Linda. A. O. Tanor (2009) *disclosure* terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. *Full disclosure*: perusahaan mengungkapkan seluruh informasi yang berkaitan dengan laporan keuangannya yang menggambarkan keadaan perusahaan apa adanya. Informasi yang diberikan pada jenis pengungkapan ini biasanya bersifat detail dan substansial.
2. *Adequate disclosure* : perusahaan melakukan pengungkapan hanya untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh institusi tertentu.
3. *Fair disclosure* : perusahaan melakukan pengungkapan wajar, tidak terlalu detail tetapi juga tidak terlalu minim.

1. Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005), diantaranya :

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan

pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2. Keuntungan dan Kerugian pengungkapan (*disclosure*)

Disclosure membawa sejumlah konsekuensi dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Berikut sejumlah keuntungan dari dilaksanakannya *disclosure*, yaitu:

1. Keuntungan terjadi apabila pengungkapan rinci mengenai produk baru dapat digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan dimasa yang akan datang kepada para pemegang sahamnya.
2. *Disclosure* dalam dunia investasi dapat berperan sebagai *public relation* bagi perusahaan yang berhubungan dengan komunitas investasi setiap saat, sehingga melalui *disclosure* masyarakat investasi dapat mengetahui keberadaan sebuah perusahaan.
3. *Disclosure* dapat mengurangi risiko timbulnya biaya litigasi bagi perusahaan.
4. Perbaikan likuiditas saham; *voluntary disclosure* akan mengurangi asimetri informasi diantara *informed* dan *uninformed* investor, sehingga untuk perusahaan dengan tingkat *disclosure* yang tinggi akan meningkatkan likuiditas saham perusahaan tersebut.
5. Mengurangi *cost of equity capital*. *Disclosure* perusahaan dapat mengurangi informasi asimetris yang terjadi di pasar modal, dan menurunnya informasi asimetris ini akan menurunkan *cost of equity capital* secara langsung.

6. *Disclosure* dapat mengurangi risiko investasi untuk investor luar, sehingga terdapat rasa aman dalam berinvestasi.
7. *Disclosure* dapat meningkatkan likuiditas pasar modal nasional secara keseluruhan.
8. *Disclosure* yang dibuat perusahaan dapat meningkatkan pemakaian jasa intermediasi financial, seperti jasa analisis sekuritas.

Adapun sejumlah kerugian dengan adanya disclosure, diantaranya:

1. Pelaksanaan *disclosure* dapat mengungkapkan strategi kepada para pesaing, sehingga mungkin menurunkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan.
2. Menurunnya keunggulan kompetitif. Pada umumnya perusahaan publik sangat sensitif dalam mengungkapkan jenis informasi yang mungkin menurunkan daya saing perusahaan. Jenis informasi tersebut meliputi: (a) informasi mengenai teknologi dan inovasi manajerial (b) informasi mengenai strategi, rencana, dan taktik (c) informasi mengenai operasi perusahaan.
3. Adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat disclosure, sementara itu pihak-pihak yang mengambil manfaat disclosure biasanya tidak mau membayar karena mereka beranggapan bahwa laporan keuangan perusahaan merupakan *public goods*. Hal ini menimbulkan peningkatan harga jual berpengaruh terhadap jumlah sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2.2.5 Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah hak atas kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keuangan lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki sumber daya, kemampuan, dan kesempatan untuk mengawasi manajer agar lebih berfokus pada nilai perusahaan dalam jangka panjang. Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela dan memaksakan tujuan investasi mereka dengan memberikan usul dan saran pada pihak manajer.

Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, pemilik paling besar dapat memainkan peranan dalam pengawasan manajemen. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan karena dapat memperoleh informasi dan mengawasi manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. Pengawasan yang tinggi dari pihak luar terhadap manajemen akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi perusahaan dan informasi tersebut digunakan dalam perencanaan dan evaluasi (Rahmawati, 2006).

Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor

institusional dibagi dengan total lembar jumlah saham yang beredar (Hexana, 2005).

Menurut Hexana (2005), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

2.2.6 Ukuran Komisaris Independen

Penelitian Beasley (1996) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Chtourou et al (2001) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006) menginvestigasi apakah praktek tata kelola perusahaan memiliki pengaruh kepada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka menemukan bahwa earnings management secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik governance oleh dewan komisaris dan komite audit. Untuk komite audit, income increasing earning management secara negative berasosiasi dengan proporsi anggota (member) yang besar dari luar yang bukan merupakan manajer pada

perusahaan lain. Untuk dewan komisaris, income increasing earning management yang rendah pada perusahaan yang memiliki outside board members yang berpengalaman sebagai board members pada perusahaan dan pada perusahaan yang lain. Artinya bahwa proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.2.7 Ukuran Komite Audit

Awal mulanya terbentuk Sarbanes Oxley Act (SOX) karena ada kasus Enron yang diindikasikan kurangnya pengendalian internal perusahaan. Pasal 301 dari undang-undang SOX tahun 2002 mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan komite audit yang semua anggotanya merupakan direktur independen. Di Indonesia, terdapat peraturan BAPEPAM-LK no.IX 1.5 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang, yang diketuai oleh satu orang komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (publikasi FCGI).

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana, dan komitmen jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Ho dan Wong (2001), menggunakan data Hong Kong, menemukan hubungan signifikan positif antara independensi komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Dalam laporan tahunan, memperlihatkan bahwa komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit dapat meningkatkan

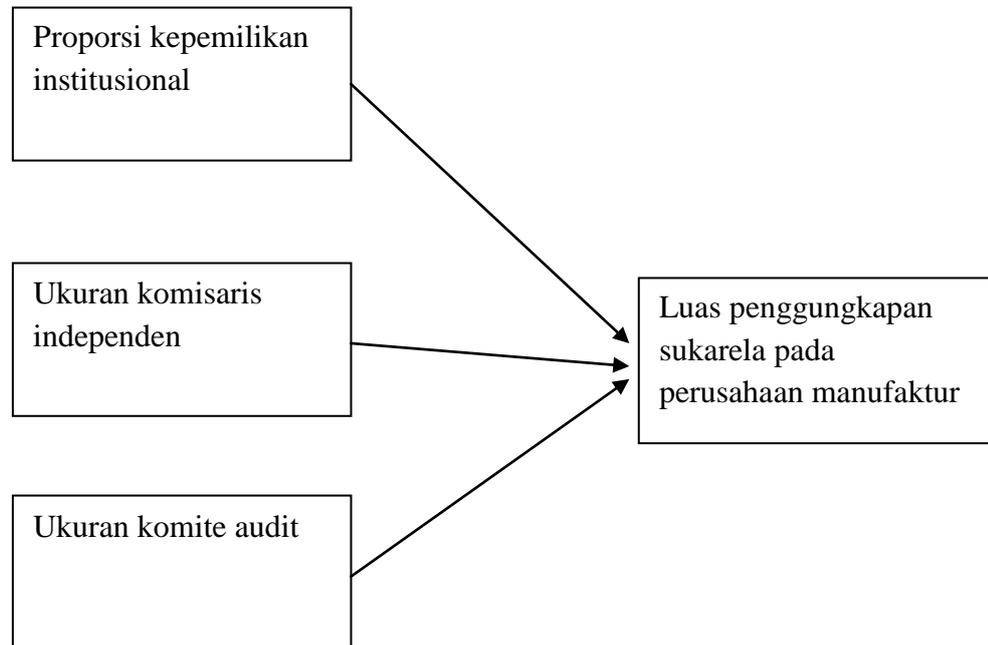
pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.

2.2.8 Kajian Teori Agensi

Teori agensi menyatakan dan menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*). Dalam penelitian ini pihak *principle* yaitu perusahaan dan menerima wewenang atau *agency* yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit (Suartana, 2010).

Teori agensi menjelaskan bahwa suatu kontrak dimana prinsipel memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipel. Dalam penelitian ini bagaimana variabel independen bekerjasama untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Misalnya dalam pengungkapan informasi perusahaan. Bagaimana anggota dewan komisaris mempertahankan independensi terhadap tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan, dan bagaimana pula komite audit mengungkapkan laporan keuangan apakah sudah sesuai atau belum serta untuk mengetahui kepemilikan yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk publik.

2.3 Kerangka pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis penelitian

H1: terdapat pengaruh antara proporsi kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

H2: terdapat pengaruh antara ukuran komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

H3: terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.